

Skema Pembayaran Baru Siap Diujicobakan di 40 FKTP Kabupaten/Kota Serang

Serang (19/09/2022) – BPJS Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI siap mengujicobakan sistem pembayaran dengan skema Belanja Kesehatan Strategis Kesehatan Ibu dan Anak (BKS KIA) di 40 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) wilayah Kabupaten/Kota Serang. Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan, Mahlil Ruby mengatakan, skema ini telah dirumuskan sejak tahun 2019 sebagai langkah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan ibu dan anak.

“Pelaksanaan uji coba skema BKS KIA dimulai September 2022 sampai dengan Agustus 2023 mendatang. Uji coba ini juga melibatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kota/Kabupaten Serang, FKTP mitra BPJS Kesehatan, United States Agency for International Development (USAID) dan World Bank,” jelas Mahlil.

Ia menuturkan, kondisi saat ini, 67% pemeriksaan kehamilan (*antenatal care/ANC*) dilakukan di rumah sakit, sementara FKTP sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan justru hanya melayani 33% ANC. Kualitas pelayanan ANC juga belum memenuhi standar sehingga kehamilan berisiko tinggi kurang teridentifikasi dengan baik dan menyebabkan tingginya rujukan ke rumah sakit.

“Persentase layanan ANC di Indonesia yang memenuhi standar baru 2,7%. Tingginya angka persalinan melalui operasi *caesar* salah satunya disebabkan oleh rendahnya kuantitas dan kualitas ANC. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan bersama Kemenkes RI dan USAID mengembangkan skema pembayaran BKS KIA demi meningkatkan efisiensi pembiayaan kesehatan ibu dan anak dengan tetap memperhatikan mutu layanan, sarana dan prasarana,” tegas Mahlil.

Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno menambahkan bahwa keberadaan BKS KIA diharapkan bisa mendorong kualitas, efisiensi, dan ekuitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak. Ia menerangkan, melalui pengembangan sistem pembayaran BKS KIA, peserta JKN bisa memperoleh manfaat layanan ultrasonografi (USG) di FKTP, layanan ANC sebanyak enam kali, dan persalinan yang dibantu oleh satu dokter dan dua bidan/perawat di FKTP.

“Manfaatnya bukan hanya untuk peserta saja. Bagi FKTP yang menerapkan BKS KIA, akan ada kenaikan besaran tarif sesuai harga keekonomian kesehatan ibu dan anak, misalnya untuk layanan ANC, persalinan, layanan pasca-persalinan (*post natal care/PNC*), dan layanan KB. Pemberian layanan ANC dan PNC lengkap di FKTP akan dipantau dan dievaluasi secara ketat. Kami juga akan menambah fitur Aplikasi P-Care untuk mempermudah proses memverifikasi penagihan klaim KIA dan memantau implementasinya di FKTP uji coba,” kata Mundiharno.

Sementara itu, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Kemenkes RI, Yuli Farianti mengungkapkan bahwa pihaknya siap memulai sistem ‘belanja strategis’ dalam layanan kesehatan ibu di Puskesmas dan klinik. Ia menegaskan, kepatuhan fasilitas kesehatan dalam memberikan layanan ibu yang terstandar akan dipantau Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

“Penguatan pemastian mutu menjadi salah satu kunci sistem BKS KIA. Klaim yang dibayarkan akan diverifikasi dengan layanan terstandar. Pemastian kualitas layanan ini akan berimbang pada peningkatan pelayanan ibu hamil dan persalinan yang merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang harus dicapai oleh pemerintah daerah,” ucapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, Agus Sukmayadi mengatakan, pihaknya siap mendukung penuh uji coba sistem BKS KIA di 4 Puskesmas dan 11 klinik swasta di Kabupaten Serang. Ia berharap, program tersebut juga mampu menurunkan angka kematian ibu yang melahirkan dan bayi baru lahir.

Senada, Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang, Ahmad Hasanuddin juga mengungkapkan bahwa pihaknya menyambut baik dan berkomitmen mendukung kelancaran uji coba BKS KIA di 8 Puskesmas dan 17 klinik swasta wilayah Kota Serang. Menurutnya, BKS KIA bertujuan untuk menciptakan layanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan akses pelayanan kesehatan.

"USAID gembira dapat mendukung BPJS Kesehatan dan Kemenkes RI dalam merancang kegiatan uji coba BKS KIA di Kabupaten/Kota Serang. Inisiatif baru ini akan membantu memperkuat kualitas layanan di fasilitas kesehatan di Indonesia dan memperbaiki status kesehatan ibu dan bayi," ungkap Wakil Direktur Kantor Kesehatan USAID Indonesia, Daryl Martyris.

Informasi lebih lanjut hubungi:

Humas BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan Care Center 165

Website www.bpjs-kesehatan.go.id

New Payment Scheme is Ready to be Piloted in 40 FKTP Serang Regency/City

Serang (19/09/2022) – BPJS Kesehatan with the Ministry of Health (Kemenkes) RI are ready to pilot a payment system with the Strategic Health Expenditure for Maternal and Child Health (BKS KIA) scheme in 40 First Level Health Facilities (FKTP) in Serang Regency/City area. BPJS Kesehatan's Director of Planning, Development, and Risk Management, Mahlil Ruby said that this scheme has been formulated since 2019 as a step to increase the effectiveness and efficiency of maternal and child health services.

"The trial implementation of the BKS KIA scheme will start in September 2022 until August 2023. This trial also involves support from the Banten Provincial Government, Serang City/Regency Government, FKTP partners of BPJS Kesehatan, United States Agency for International Development (USAID), and the World Bank," explained Mahlil.

He said, in the current condition, 67% of antenatal care (ANC) is carried out in hospitals, while FKTP as the front line of health services only serves 33% of ANC. The quality of ANC services also does not meet the standards causing high-risk pregnancies are not well identified and lead to high referrals to hospitals.

"The percentage of ANC services in Indonesia that meet the new standard is 2.7%. Therefore, BPJS Kesehatan with the Ministry of Health of the Republic of Indonesia and USAID developed BKS KIA payment scheme in order to increase the efficiency of maternal and child health financing, while still paying attention to the quality of services, facilities, and infrastructure," Mahlil said.

BPJS Kesehatan's Director of Supervision, Inspection, and Inter-Institutional Relations, Mundiharno added that the existence of the BKS KIA is expected to boost the quality, efficiency, and equity of health services for mothers and children. He explained that through the development of the BKS KIA payment system, JKN participants could benefit from ultrasonography (USG) services at the FKTP, six ANC services, and deliveries assisted by one doctor and two midwives/nurses at FKTP.

"The benefits are not only for the participants. For FKTPs that apply BKS KIA, there will be an increase in the rate according to the economic price of maternal and child health, for example for ANC services, childbirth, post-natal care (PNC), and family planning services. The provision of complete ANC and PNC services at FKTP will be monitored and evaluated closely. We will also add the features in P-Care Application to simplify the process of verifying the billing of KIA claims and monitor its implementation in the trial FKTP," said Mundiharno.

Meanwhile, the Head of the Center for Health Financing and Decentralization Policy at the Ministry of Health of the Republic of Indonesia, Yuli Farianti, revealed that her party was ready to start a 'strategic spending' system in maternal health services at Health Centers and clinics. She emphasized that the compliance of health facilities in providing standardized maternal services would be monitored by the Health Service and BPJS Kesehatan.

"Strengthening quality assurance is one of the keys to the BKS KIA system. Claims will be verified with standardized services. Ensuring the quality of this service will have an impact on improving services for pregnant women and childbirth which are part of the Minimum Service Standards (SPM) in the health sector that must be achieved by local governments," she said.

The Head of the Serang District Health Office, Agus Sukmayadi, said that his party is ready to fully support the trial of the BKS KIA system in 4 Puskesmas and 11 private clinics in Serang Regency. He hopes that the program will also be able to reduce maternal and newborn mortality rates.

Similarly, the Head of the Serang City Health Office, Ahmad Hasanuddin, also revealed that his party is committed to supporting the smooth trials of BKS KIA in 8 Puskesmas and 17 private clinics in the Serang City area. According to him, BKS KIA aims to create more effective and efficient health services, as well as improve access to health services.

"USAID is ready to support BPJS Kesehatan and the Indonesian Ministry of Health in designing the BKS KIA pilot activity in Serang Regency/City. This new initiative will help strengthen the quality of services in health facilities in Indonesia and improve the health status of mothers and babies," said Deputy Director of the Health Office of USAID Indonesia, Daryl Martyris.